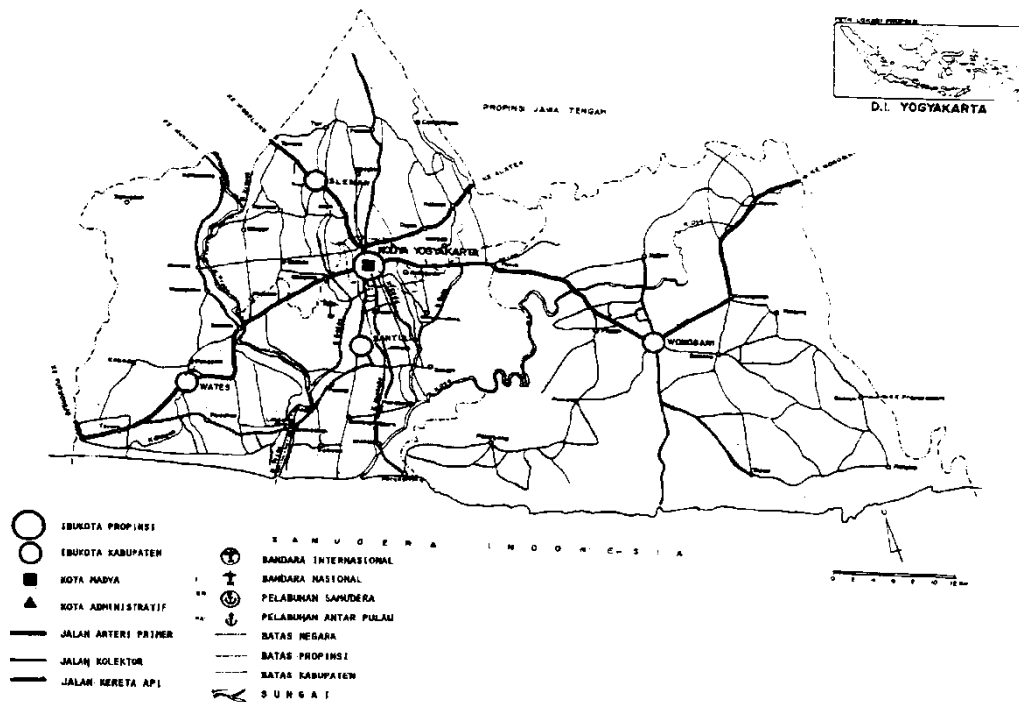


## BAB II

### DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 1.1



Gambar Peta Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara  $7.33^{\circ}$  - $8.12^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $110.00^{\circ}$ -  $110.50^{\circ}$  Bujur Timur, tercatat memiliki luas  $3.185,80$  km atau  $0,17\%$  dari luas Indonesia  $1.860.359,67$  km ([jogjaprovo.go.id](http://jogjaprovo.go.id)).

Secara administratif Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 1 Kota-madya dan 4 Kabupaten. Seluruh Daerah Tingkat II tersebut meliputi 73 kecamatan serta 438 desa dan kelurahan.

Dengan perkiraan angka pertumbuhan penduduk rata-rata 1,6% per tahun, pada tahun 2016 penduduk DI Yogyakarta berjumlah 3.627.962 jiwa. Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten yang penduduknya terpadat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah penduduk 1.079.210 jiwa, sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah, yaitu 412.331 jiwa (jogjaprovo.go.id).

## **B. Profile Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta**

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dipilihnya Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki data yang diperlukan untuk penyusunan penelitian ini.

### **1. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta**

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial.
2. perumusan kebijakan teknis bidang sosial.
3. pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat.

4. pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten/Kota.
5. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.
6. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial.
7. pemanfaatan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial.
8. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
9. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Visi dan Misi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017**

VISI

‘Penggerak dan Penyelenggara Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang Profesional guna Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, Berkarakter, dan Berbudaya’

MISI

Untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, maka misi yang akan dijalankan adalah :

1. Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial;

2. Menanggulangi kemiskinan dengan melakukan pengembangan dan pemberdayaan sosial;
3. Mengembangkan partisipasi masyarakat, lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

## **2. Struktur Organisasi**

Susunan Struktur Organisasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program dan Informasi
3. Bidang perlindungan dan rehabilitasi sosial
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban Napza
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Perlindungan Anak
4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
  - a. Seksi KTK, Pekerja Migran dan Jamsos
  - b. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana
  - c. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lanjut Usia
5. Bidang Pengembangan Sosial

- a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
  - b. Seksi Keluarga Bermasalah Sosial
  - c. Seksi Penyuluhan Sosial
6. Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat
- a. Seksi Orsos dan Sumbangan Sosial
  - b. Seksi Tenaga Kesos Masyarakat
  - c. Seksi Kepahlawanan Keperintisan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
- a. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita
  - b. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha
  - c. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras
  - d. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak
  - e. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas
  - f. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

### **C. Panti Sosial Bina Karya**

#### **1. Sejarah Panti Sosial Bina Karya**

Tahun 1976 berdiri Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial bertempat di Karangrejo, Tegalarjo Yogyakarta. Pada tahun 1979 mulai melaksanakan rehabilitasi sosial pengemis, gelandangan dan orang terlantar (SK Mensos RI No. 41/HUK/KH/XI-79). Tahun 1994 nama Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo (SK Mmensos RI No. 14/HUK/94, tentang pembukaan nama unit pelaksana teknis Pusat/Panti di lingkungan Departemen Sosial). Tahun 1996 PSBK Sidomulyo digabung dengan Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) dengan nama Panti Sosial

Bina Karya Sidomulyo berkedudukan di Purwomartani Kalasan (SK Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial Depsos RI No. 03/KEP/BRS/I/1996). Tahun 2002 PSBK menjadi UPTD dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Tahun 2003 pelayanan PSBK mulai menjangkau eks penderita sakit jiwa terlantar.

Tahun 2004 PSBK menjadi UPTD dari Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta. Tahun 2016 PSBK berubah nama menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) DI Yogyakarta. Dan pada tahun 2017 BRSBKL memisahkan unit Bina Karya dan Bina Laras menjadi dua lokasi, di mana BRSBKL unit 1 yang berlokasi di Sidomulyo fokus pada penanganan gelandangan, pengemis, dan pemulung, sedangkan BRSBKL unit 2 yang berlokasi di Purwomartani Kalasan fokus pada penanganan eks psikotik.

## **2. Lokasi Panti Sosial Bina Karya**

Panti Sosial Bina Karya (PSBK) yang terletak di Jl. Sidomulyo, Bener, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55243, Indonesia atau tepatnya ±500 meter sebelah utara dari monumen tugu pal putih / tugu Jogja.

Panti Sosial Bina Karya (PSBK) mempunyai fasilitas yang cukup memadai, masing-masing dari dan fasilitas sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, papan, dan kesehatan,
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan,
3. Pemberian bimbingan fisik, mental, sosial, dan rohani,
4. Pemberian pelatihan keterampilan,
5. Penyaluran kerja, rujukan dan pemberdayaan ekonomik kreatif,

6. Pendampingan Pekerja Sosial

### 3. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi Panti Sosial Bina Karya sebagai berikut :  
(jogjaprov.go.id)

Kepala : Drs. Rusdiyanto,MM.

Ka.Sub Bag . Tata Usaha : Sri Lestari. SST.MSi.

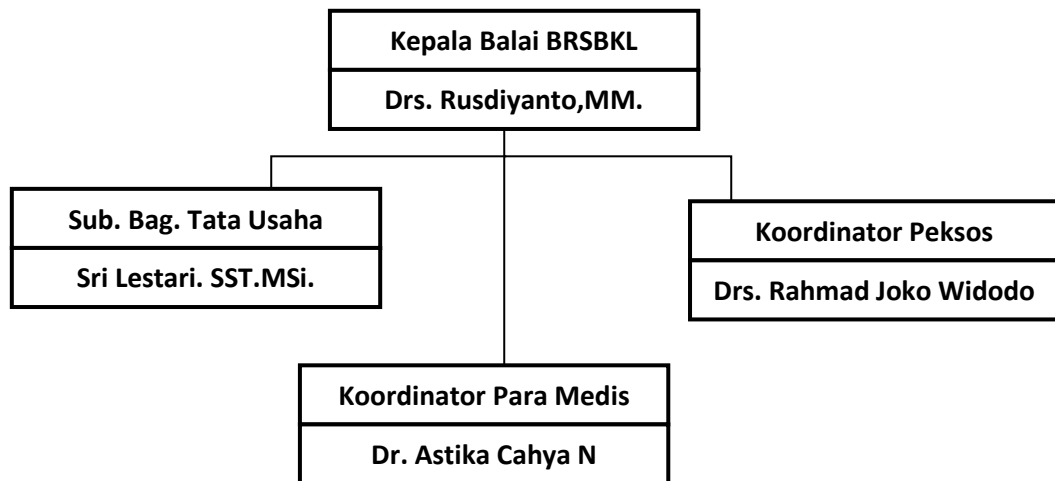
Sie Pelayanan dan Rehabilitasi

Koordinator Pekerja Sosial : Drs. Rahmad Joko Widodo

Koordinator Para Medis : Dr. Astika Cahya N

Tabel 1.2

Struktur Organisasi  
Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras



Sumber : Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

### 4. Tugas dan fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

Balai RSBKL DIY sebagaimana tugas dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS gelandangan dan pengemis atau

gepeng. Dengan kapasitas gepeng yang dapat dilayani setiap tahunnya sebanyak 50 orang. 50 orang gepeng yang ditangani tersebut memiliki identitas, profil, serta latar belakang yang berbeda-beda. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum, sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Berikut persyaratan dan ketentuan dari klien penyandang masalah gelandangan dan pengemis yang akan melalui proses rehabilitasi.

- a. Pria/wanita (gelandangan pengemis)
- b. Usia Produktif maksimal 50 tahun
- c. Sudah atau belum berkeluarga
- d. Berbadan sehat dan tidak mempunyai penyakit menular
- e. Tidak sedang dalam proses peradilan/kepolisian
- f. Selama mengikuti pembinaan bersedia tinggal di balai
- g. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku.

Adapun daerah asal data Warga Binaan Sosial (WBS) untuk kategori gepeng di Balai RSBKL DIY per Bulan Juni Tahun 2017 dapat dilihat pada grafik-grafik di bawah ini (<http://brsbkl.jogjaprovo.go.id>):



Gambar 1.2



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwasanya warga binaan sosial gelandangan dan pengemis di daerah Yogyakarta banyak berasal dari daerah luar Yogyakarta. Sebagian besar berasal dari daerah Jawa Tengah dimana berjumlah 30 orang sedangkan balai rehabilitasi sosial bina karya dan laras hanya dapat menampung 50 warga binaan. Jumlah ini melebihi setengah dari kapasitas yang diberikan balai rehabilitasi sosial bina karya dan laras, Salah satu penyebab meningkatnya gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar Yogyakarta adalah adanya kelompok orang yang melakukan urbanisasi dari desa ke kota namun belum memiliki tujuan yang jelas dan tidak direncanakan dengan baik.